

Judul : Aroma tak sedap dari balik tembok Parlemen
Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KESEHATAN LINGKUNGAN

Aroma Tak Sedap dari Balik Tembok Parlemen

Besarnya atensi Komisi IV dan Komisi XII DPR terhadap pengawasan kesehatan lingkungan kiranya masih kalah kuat dibandingkan dengan bau tak sedap yang merebak dari balik tembok tempat penampungan sampah Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bau tak sedap dari balik tembok dekat Halte Transjakarta Palmerah dan tangga jembatan penyeberangan ke Stasiun Palmerah itu membuat warga yang melintas bergesah melalui area itu sambil menutup hidung.

Ara (28), salah satunya. Beberapa langkah mendekati area itu, Rabu (15/10/2025), karyawan dengan pin merah muda bertuliskan "Ibu Hamil" yang tersemat di kerudungannya itu langsung mengeluarkan sapu tangan, lalu menutup hidung rapat-rapat.

Ara mengaku jengah harus melalui jalur itu setiap hari dari kantornya menuju Halte Transjakarta Palmerah yang berjarak sekitar 600 meter.

"Duh, tiap hari lewat sini, baunya parah banget. Sampai mau muntah. Biasanya juga, sih, bau, tetapi kini kian jadi," ucap Ara dengan nada keuh.

Ara tak punya pilihan lain selain melintasi area itu. Trotoar di Jalan Tentara Pelajar itu menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan kantornya ke halte Transjakarta yang akan membawanya pulang ke Bekasi. "Jadi, ya, setiap hari harus lewat sini meskipun baunya enggak nahan," ujarnya.

Widodo (40), salah satu pedagang asongan di sana, juga memaksakan diri untuk terbiasa dengan aroma sampah dari daerah itu. Meskipun timbunan sampah dari sana kerap diangkat, bau tidak sedap tetap merebak dan membuat sebagian besar orang yang melintasinya menutup hidung.

"Kalau sudah lama kayak saya, sudah terbiasa. Di sini lebih dari tujuh bulan," ka-

Situasi di Kompleks Parlemen ini seolah menjadi cermin betapa pengelolaan sampah masih sebatas wacana.

tanya sambil tertawa.

Itanya, menurut Widodo, timbunan sampah kali ini jauh lebih sedikit dibandingkan beberapa hari sebelumnya. "Sebelumnya sempat banyak terus sampahnya dalam satu hulan," kata Widodo.

Adapun saat ini anggota DPR sedang menjalani reses sejak 3 Oktober lalu dan akan berlangsung hingga 3 November mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar berjanji akan segera mengecek lokasi pembuangan sampah di Kompleks Parlemen yang dikeluhkan warga. "Selama ini belum pernah ada laporan tentang itu," ujarnya.

Meski demikian, Indra kembali mengabarkan telah menerima laporan dari bawahannya yang intinya problem muncul karena ada perubahan pengangkutan sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Sebelumnya pengangkutan dari pemda biasanya dilakukan lebih dari satu kali. Tapi, dalam dua minggu ini, hanya satu kali," tambahnya.

Pihak Sekretariat Jenderal DPR sudah mengomunikasikan problem yang muncul imbas dari berkurangnya intensitas pengangkutan sampah itu ke Pemerintah Provinsi DKI. Untuk itu, pada Kamis sudah langsung dilakukan dua kali pengangkutan sampah dan pembersihan di sekitar area tempat penampungan sampah.

Ke depan, lanjutnya, pihak Setjen DPR meminta agar lebih banyak armada truk yang dikerahkan untuk mengang-

kut sampah setiap harinya.

Semestinya diolah

Dosen Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University, Meti Ekayani, menilai, masalah pengelolaan sampah merupakan persoalan umum yang terjadi di banyak tempat. "Memang, masalah sampah itu menggemaskan. Mestinya sepele dan mudah. Ternyata besar dan sulit," ujarnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan sampah seharusnya dimulai dari pemilahan antara sampah organik atau basah yang mudah membusuk dan sampah anorganik atau kering yang dapat bertahan lama. Dengan pemisahan itu, sampah anorganik tidak rusak dan tetap dapat dimanfaatkan.

Sampah organik, lanjutnya, sebaiknya diolah menjadi pupuk dengan memilih metode yang paling sesuai, tidak berbau, mudah, dan cepat. Terdapat berbagai metode yang bisa diterapkan, seperti *bio-enzyme*, *maggot* BSE, pupuk organik cair (POC), fermentasi, ataupun pengomposan.

Adapun sampah anorganik yang masih dapat dimanfaatkan sebaiknya disalurkan ke bank sampah atau pihak pengelola, seperti Was-te4Change dan lembaga serupa. Selama dalam kondisi kering dan tidak tercampur dengan sampah organik, sampah anorganik tidak akan busuk atau berbau meskipun disimpan lama.

Situasi di Kompleks Parlemen ini seolah menjadi cermin betapa pengelolaan sampah masih sebatas wacana. Jika dari pusat pengawasan kebijakan saja kesadaran mengolah sampah belum tumbuh, bagaimana mungkin tanggung jawab menjaga kesehatan lingkungan bisa diterapkan masyarakat luas?

(MACHRADIN WAHYUDI RUPONGA, NIKOLAUS HARIBOWO)